

# Buletin Parlementaria

Nomor 1025/III/IX/2018 • September 2018



2<sup>ND</sup> WORLD PARLIAMENTARY FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

17 SEPTEMBER 2018, BALI, INDONESIA



## Ketersediaan Energi Tunjang Pembangunan Berkelanjutan



9 772614 339005

Pemerintah Diminta Revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018

# Ketersediaan Energi Tunjang Pembangunan Berkelanjutan

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong parlemen dunia meningkatkan kerja sama lintas sektor serta melakukan inovasi pada keuangan, teknologi, infrastruktur dan kemitraan untuk memastikan semua orang memiliki akses ke energi berkelanjutan. Akses ke energi bersih, aman dan terjangkau, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.**

“Ketersediaan energi seperti listrik sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sekaligus menjadi kebutuhan mutlak menunjang pembangunan. Namun, hal ini menjadi tantangan besar bagi kita mengingat ketergantungan pada energi fosil dan pengembangan sumber energi terbarukan masih sangat terbatas,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, saat membuka The 2<sup>nd</sup> World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Rabu (12/9).

WPFSD yang diselenggarakan di Bali pada 12-13 September 2018 ini diikuti sekitar 45 negara. Antara lain Argentina, Bahrain, Bolivia, Iran, Iraq, Jordan, Palestina, Peru, Serbia, Uni Emirat Arab, Venezuela, Kribati, Solomon Island, Tonga, Armenia, Botswana, Egypt, Ghana, Madagaskar, Micronesia, Mongolia, Morocco, Serbia, Timor Leste serta Turki. Pertemuan WPFSD ini membahas topik “Menuju Energi Berkelanjutan untuk Semua”.

Selain itu, ikut serta 5 negara *observer*, yaitu Belarus, China, Nigeria, Papua New Guinea, dan Qatar. Tak ketinggalan, organisasi internasional serta pemerintahan juga turut hadir. Antara lain ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Ernst & Young, Geneva Council for International Affairs and Development (GCIAD), United Nations Environment Programme (UNEP), Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan Women Political Leader Global Forum (WPL).

“Penetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan Paris Agreement mengenai perubahan iklim di tahun 2015 lalu, telah mengidentifikasi

energi sebagai salah satu sektor utama bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan tahun 2030 sebagai target waktu untuk memastikan akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern bagi semua,” jelas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, permintaan energi semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang terus berkembang. Ketergantungan terhadap energi fosil terutama minyak bumi menimbulkan

## WPFSD merupakan wadah pertemuan Parlemen Dunia yang digagas DPR RI sejak tahun 2017

kekhawatiran mengingat energi tersebut bukan energi yang terbarukan. “Potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin cukup besar. Hanya saja sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas,” imbuhnya.

Bamsoet menilai, pemanfaatan energi terbarukan yang masih terbatas disebabkan banyak faktor. Antara lain harga yang belum kompetitif bila dibandingkan dengan energi fosil, penguasaan teknologi yang rendah sehingga nilai impornya tinggi, keterbatasan dana untuk penelitian, pengembangan, maupun investasi, serta



Foto bersama seluruh Delegasi WPFSD ke - 2 di Bali

infrastruktur yang kurang memadai.

“Pembangunan berkelanjutan di bidang energi, dalam proses produksi dan penggunaannya, mendukung pembangunan manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat harus terlibat sehingga bisa melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi dunia,” tegas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan, energi dan cara menggunakannya harus efisien dan sedapat mungkin terbarukan. Sumber energi terbarukan, seperti angin, matahari dan air, di banyak negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin bisa diubah menjadi keuntungan ekonomi untuk mempersempit kesenjangan regional.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sudah memulai mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Beberapa diantaranya



melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 626 unit, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 69 unit dan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) 2 unit. Yang paling terbaru, Presiden Jokowi telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang berlokasi di Sidrap. Kapasitas pembangkit ini 75 Mega Watt (MW),” papar Bamsuet.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini menyadari akan banyak tantangan berupa pembiayaan, sarana pelaksanaan, dan inovasi dalam menciptakan kerja sama global maupun regional untuk pengembangan energi terbarukan. “Karena itulah kita berkumpul di sini untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman serta mencari solusi terbaik,” pungkas Bamsuet.

Saat membuka forum WPFSD tersebut, Bamsuet juga menandatangani Sampul Hari Pertama (First Day Cover) WPFSD. Penandatanganan juga dilakukan oleh para Wakil Ketua DPR RI seperti Fadli

Zon, Agus Hermanto dan Utut Adianto, serta Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dengan disaksikan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan Filateli Indonesia Gita Noviandi.

“Penandatanganan Sampul Hari Pertama merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan event internasional di Indonesia. DPR RI mempelopori hal ini agar kegiatan WPFSD bisa tercatat dalam lembar memori sejarah Bangsa Indonesia melalui filateli,” imbuh Bamsuet.

WPFSD merupakan wadah pertemuan Parlemen Dunia yang digagas DPR RI sejak tahun 2017. Forum ini secara khusus diselenggarakan untuk meningkatkan peran Parlemen Dunia dalam mendukung pencapaian SDGs atau Agenda 2030. Di pertemuan pertama tahun 2017, berhasil merumuskan pembangunan yang inklusif dan merata sehingga tidak ada pihak yang ditinggalkan. ■ eko,jay/sf

#### PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

#### KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

#### WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

#### PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

#### PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

#### WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

#### REDAKTUR

Sofyan Efendi

#### SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

#### ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

#### REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

#### FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiyati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah, Gerald Opie

#### ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

#### ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

#### PENERBITAN

##### PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

##### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

##### PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

##### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

##### STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

##### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

##### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

##### ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

##### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar meninjau lokasi bencana gempa di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB)

## Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal

**Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meninjau lokasi bencana gempa di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mendengarkan aspirasi warga yang menjadi korban gempa. Menurutnya, masih banyak warga yang menyampaikan keluhan tentang kondisi penanganan dampak gempa bumi yang belum optimal.**

sudah mengadakan rapat konsultasi dengan kementerian dan lembaga terkait koordinasi penanganan dampak bencana di Pulau Lombok dan Sumbawa, Senin (10/9) lalu.

“Kami sudah membahas masalah tersebut kemarin, dan ini saya datang khusus melihat realitas penanganan bencana di lapangan. Jangan sampai dikatakan beres, tapi kenyataan di lapangan lambat, bahkan tidak sampai sasaran,” kata Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu juga sudah meminta pemerintah mengecek langsung hingga ke masyarakat tingkat

Fadli bersama Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar dan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) NTB diterima di Posko Dusun Lendang Bajur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari,

Lombok Barat, NTB, Selasa (11/9/2018). Rombongan juga menyerahkan bantuan kebutuhan pokok dan logistik berupa terpal dan 200 lembar selimut.

Di hadapan warga terdampak gempa, Fadli mengatakan, pihaknya



Foto: Abu/cod

bawah. Karena pada kenyataannya, masih ada warga yang belum merasakan langsung realisasi janji bantuan yang disebutkan pemerintah, dimana angka bantuannya cukup besar.

“Kami ingin pastikan janji dari pemerintah, karena itu salah satu fungsi DPR mengawasi supaya tepat sasaran. Terutama yang sifatnya jangka menengah, yakni hunian sementara sebelum datang musim hujan,” ujarnya.

Sementara itu sebelumnya, Ketua Posko Dusun Lendang Bajur Wayan Kantil mengaku harus proaktif jika ingin mendapatkan bantuan bahan makanan dari pemerintah. “Lima hari setelah gempa, bantuan bahan makanan sama sekali belum ada. Beruntung ada relawan yang datang mendistribusikan bantuan bahan makanan,” kata Wayan.

Ia juga menyampaikan

perhatian dari pemerintah terkait bantuan tenda untuk sekolah darurat belum ada. Sementara kondisi bangunan sekolah dasar di Lendang Bajur rusak berat. “Kami sudah melobi agar diberikan tenda berukuran besar untuk dijadikan sekolah darurat, tapi belum ada sampai sekarang,” tutur Wayan.

Wayan juga menyebutkan total rumah rusak di wilayahnya sebanyak 210 unit, terdiri atas 30 rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun warga yang sudah memperoleh bantuan dana untuk perbaikan rumah meskipun sudah diverifikasi oleh petugas.

“Kami terus bergerak agar bantuan yang dibutuhkan warga bisa diberikan, terutama tenda untuk sekolah darurat dan perbaikan rumah. Sembako juga masih sangat dibutuhkan untuk menyambung hidup,” katanya. ■ ann/sf

# Pemerintah Diminta Revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018

**DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak, yakni Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh Kementerian dan Lembaga yang digerakkan dalam pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.**

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat membacakan salah satu kesimpulan rapat konsultasi DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/9).

Fahri menambahkan, pihaknya juga meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid. “Yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan didukung pembiayaan penanganan dampak gempa,” jelasnya.

Kemudian, DPR RI juga meminta agar pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. “Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai dengan jangka panjang,” ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Lebih lanjut, DPR RI meminta agar pemerintah meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Pemerintah dapat mengatur agar huntara menjadi rumah tumbuh yang pada waktunya menjadi permanen.

Terakhir, DPR RI meminta agar dana bantuan stimulan segera ditransfer sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola. “Sehingga tidak tersimpan lama di rekening, menjadi modal masyarakat untuk membangun tempat tinggalnya,” tutup politisi dapil NTB itu. ■ rnm/sf



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Foto: Andri/cod

# Energi Baru Terbarukan Adalah Keniscayaan

**Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyatakan bahwa untuk mencari Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih baik adalah merupakan suatu keniscayaan. Dikatakannya, masalah energi baru dan terbarukan bukanlah isu baru di dunia, hanya saja memang belum ditemukan cara yang paling efektif untuk melakukannya.**

“ Yang penting saat ini kita sudah mulai bekerja. Saat ini *lifting* minyak kita juga sudah semakin kecil, dan kita belum punya alternatif. Peta solusinya sudah ada, hanya implementasi untuk menjalankannya yang belum ada,” ujar Utut di sela-sela The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Rabu (12/9).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) itu menjelaskan, forum parlemen ini merupakan bagian dari kegiatan Parlemen Indonesia di dalam pergaulan internasional. Dimana Indonesia menjadi bagian dari negara-negara yang tergabung dalam G20.

“Kita adalah masyarakat internasional yang aktif. Perihal implementasi dari

hasil deklarasi acara ini ke depannya bagaimana, maka itu adalah lain hal. Sebab deklarasi dalam politik itu tidaklah mudah,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Utut menyampaikan, peran aspirasi sudah dijalankan, tinggal eksekusinya ada pada eksekutif. “Semua ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, apalagi yang hadir pada acara ini terdiri dari berbagai negara. Kalau untuk pemerintah, kita akan lebih kuat (membahasnya) ketika rapat di dalam komisi terkait,” ungkap Utut.

Terkait persoalan energi nuklir, Utut sempat memberikan pernyataannya. Menurutnya masalah energi nuklir tersebut tidaklah mudah. “Sebab untuk energi nuklir itu dibutuhkan suatu keahlian khusus, dan konsekuensi (risiko) nya juga tidak ringan,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah itu. ■ dep/sf



## Energi Panas Bumi Indonesia Harus Diperkuat

**Sektor energi panas bumi di Indonesia harus dikuatkan. Hal tersebut sesuai dengan *Paris Agreement* yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto usai menjadi pembicara dalam forum *The 2<sup>nd</sup> World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* di Bali, Rabu (12/9).**

“ Energi baru terbarukan yang ramah lingkungan ini harus kita kuatkan. Presiden Jokowi juga sudah menandatangani *Paris Agreement*, yang di dalamnya mengharuskan kita

untuk ikut menjaga lingkungan dunia, yakni dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan. Oleh karenanya, kita harus memperkuat masalah energi baru terbarukan ini,” ucap Agus.

Agus menjelaskan, energi *geothermal* memiliki *resources* yang cukup tinggi. Begitu juga dengan energi angin yang sudah berjalan pembangunannya, yaitu di wilayah Jeneponto dan Sidrap, Sulawesi Selatan, yang potensinya juga sangat bagus. “Sehingga kita harus menguatkan energi ramah lingkungan, yang dalam hal ini adalah energi *geothermal*, energi angin, dan juga energi surya,” paparnya.

Terkait acara The 2nd WPFSD yang digelar di Pulau Dewata ini, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu menyatakan bahwa hal tersebut merupakan momen yang baik dalam upaya memperkuat masalah energi baru terbarukan (EBT).

“Hari ini adalah waktu yang sangat tepat, dimana kita akan memperkuat sektor energi baru terbarukan. Mudah-mudahan ini dapat mencapai hasil yang maksimal seperti apa



Foto: Eka/od

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menandatangani Sampul Hari Pertama WPFSD

yang diinginkan oleh kita dan oleh dunia,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Selain itu, Agus juga sempat mengatakan bahwa sebagai pulau yang indah, Bali harus mampu menyuguhkan kondisi yang bersifat ramah lingkungan, agar wisatawan yang berkunjung ke Bali akan merasa nyaman. Apalagi salah satu dampak positif dari limbah buangan energi *geothermal* juga bisa dimanfaatkan bagi kesehatan dan juga pertanian.

“Saat ini energi listrik di Bali masih berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, dan batu bara termasuk kategori yang tidak ramah lingkungan. Bali harus dijadikan primadona dengan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Apabila energi ramah lingkungan di Bali terwujud, saya yakin sektor pariwisata akan menjadi naik,” tutur politisi dapil Jawa Tengah itu.

■ dep/sf



Foto: Eno/od

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

# Serap Masukan RUU Pertanahan, Komisi II Kunjungi Unpad



Foto: Ria/od

Tim Panja RUU Pertanahan Komisi II DPR RI mengunjungi Universitas Padjadjaran

## Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyerap masukan dari para akademisi baik dari sisi hukum maupun pertanahan di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (07/9).

Dalam pertemuan yang digelar di Rektorat Unpad itu, menghadirkan Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. med. Tri Hanggono A., dr., pakar pertanahan Prof. Dr. Ir. Benny Joy, MS., dan pakar hukum Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., dan Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.

Herman mengatakan, RUU Pertanahan ini sebagai komplementasi untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebab, saat ini banyak sekali yang sudah berubah dalam masyarakat, dalam penyelenggaraan negara dan dinamika ekonomi.

“RUU Pertanahan ini sudah 2 periode belum juga rampung, sayang kalau dihentikan. Sebab, dari sisi substansi ada aspek kepastian hukum, keadilan perolehan dan pemanfaatan tanah serta harmonisasi hukum,” kata Herman, usai pertemuan.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam pembahasan RUU Pertanahan, yaitu masalah sengketa tanah, permasalahan batasan luas maksimum

dari kepemilikan tanah, permasalahan di bank tanah dan permasalahan peradilan pertanahan.

“Makanya kita terus meminta masukan dari berbagai pihak, agar kita mendapat gambaran yang jelas dalam penyusunan ini. Kami berharap undang-undang ini bisa selesai pada periode ini dan memberikan legitimasi bagi semua pihak,” tandas



Foto: Eot/od

Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir

politisi dapi Jawa Barat itu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja. Ia mengatakan RUU Pertanahan sedang mengali banyak masukan dari para pakar, agar pihaknya mendapat gambaran yang komprehensif. Apalagi, pembahasan RUU Pertanahan ini sudah dari periode tahun lalu, namun terjadi *deadlock* antar pemerintah, karena pemerintah tidak satu suara.

“Pembahasan RUU ini melibatkan 7 kementerian dan lembaga (K/L) saat itu. Ini yang krusial, tarik menarik di pemerintah, adanya ego sektoral. Saya mendorong Presiden untuk segera mengatasi ini dalam rapat kabinet, agar RUU ini bisa selesai, kepentingan dielaborasi agar tidak mengemuka. Terlebih saat ini yang ada di RUU tinggal 4 K/L,” jelas politisi PAN itu.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unpad Prof. Dr. med. Tri Hanggono A., dr. mengatakan, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pertanahan itu. Diantaranya, soal bank tanah, peradilan pertanahan, serta batasan luas maksimum dari kepemilikan tanah.

“RUU ini memiliki irisan dengan regulasi lain. Sehingga kami memandang perlu ditinjau, kecenderungannya RUU Pokok Agraria tetap dipertahankan, karena tidak bisa digeser, khususnya pasal 1-15. Dan ada juga UU lain yang beririsan. Perguruan tinggi akan menyusun dengan mengajak bidang ilmu lain, lalu dibahas kembali,” jelas Rektor Unpad. ■ rnm/sf

“ Namun sebenarnya jika dilihat dari anggaran Polri tahun 2018 sebesar lebih dari Rp 95 triliun itu, maka riil permintaan tambahan anggaran Polri hanya sekitar Rp 24 triliun,” jelas Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir usai memimpin Rapat Kerja dengan Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Ari Dono Sukanto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (06/9).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menilai permintaan tambahan anggaran Polri adalah hal yang wajar, karena dilihat dari ekonomi Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan, atau dengan kata lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambah besar, maka permintaan tersebut adalah hal yang



# Komisi II Serap Masukan RUU Pertanahan di Ubaya

**Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali melakukan pertemuan dengan Rektor, Dekan, Mahasiswa dan Alumni Universitas Surabaya (Ubaya) guna menyerap masukan untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan.**

“Kami telah berdiskusi dan mendapatkan informasi dari Ubaya, baik dari rektor, dekan dan para narasumber tentang masukan-masukan untuk Rancangan UU Pertanahan yang sedang kami bahas saat ini,” ungkap Zainudin usai pertemuan dengan civitas akademika Ubaya, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (07/9).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa Komisi II DPR RI membutuhkan masukan yang sebanyak-banyaknya dan yang membangun, karena undang-undang yang dibahas ini adalah revisi terhadap UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sudah cukup lama.

“Undang-undang ini merupakan revisi terhadap undang-undang tahun 1960 yang sudah lama dan perkembangan permasalahan di masyarakat sudah cukup banyak, yang mana menurut kami tidak terakomodir dalam undang-undang sebelumnya,” kata Zainudin.

Ia melanjutkan, dalam UU ini akan diupayakan semaksimal mungkin sehingga undang-undang

ini bisa menjadi dasar pijakan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan sektor-sektor terkait tentang pertanahan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Kami senang, banyak masukan yang

kami dapat, makin lengkap maka makin baik. Sehingga pembahasan di DPR pun menjadi semakin cepat,” tambah politisi dapil Jawa Timur itu.

Adapun contoh masukannya, lanjut Zainudin, supaya dalam RUU Pertanahan ini terdapat berapa jumlah batasan-batasan yang boleh diberikan kepada korporasi dan masyarakat secara individual, ini merupakan masukan yang sangat bagus.

“Segera, dari temuan ini akan kami kompilasi dari tim-tim kami yang melakukan kunjungan kerja ke Universitas Padjadjaran dan Universitas Udayana. Dan mengapa di Jawa Timur kami pilih Ubaya karena Fakultas Hukumnya sangat kuat dalam pelaksanaan program-programnya,” tutup Zainudin. ■ cas/sf



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Ubaya

Foto: Chasbi/od

# Komisi III Setujui Penambahan Anggaran Polri Tahun 2019

**Komisi III DPR RI menyetujui permintaan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tahun 2019. Berdasarkan rencana kerjanya, Polri mengajukan anggaran sebesar Rp 126 triliun. Namun pagu indikatif yang didapat sebesar Rp 76,9 triliun, sehingga Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 44,4 triliun.**

sangat wajar.

Selain itu, pada tahun depan Indonesia juga menggelar berbagai pesta demokrasi secara serempak, mulai dari Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota dan sebagainya yang memang membutuhkan pengamanan, maka permintaan tambahan anggaran Polri adalah hal yang cukup wajar.

Terlebih lagi, menurut Kahar, Polri menjadi salah satu mitra kerja Komisi

III DPR RI yang memiliki penyerapan anggaran yang cukup tinggi, yakni tidak kurang dari 95-96 persen. Kinerja yang dihasilkan Polri dari anggaran yang diberikan tersebut dinilai Kahar cukup baik, sehingga tidak ada alasan bagi Komisi III DPR RI untuk tidak menyetujuinya.

Meski demikian pihaknya berharap, permintaan tambahan anggaran Polri itu juga harus diiringi dengan peningkatan kinerja Polri yang profesional, independen dan terpercaya. ■ ayu/sf

## Komisi II Gali Masukan RUU Pertanahan di Unud



Tim Kunker Komisi II DPR RI mengunjungi Universitas Udayana Bali

**Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali, guna menggali masukan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Bali dipilih menjadi tujuan kunspek karena di Pulau Dewata ini cukup banyak kasus gugatan kepemilikan tanah.**

**P**ertemuan digelar di Rektorat Universitas Udayana, Bali, Jumat (07/9), dengan menghadirkan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana (Unud) I Gusti Bagus Wiksuana, Wakil Rektor Bidang Akademik Unud I Nyoman Gde Antara, Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Budi Situmorang, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Bali Rudi Rubijaya.

Mardani mengatakan, RUU Pertanahan ini sebagai komplementasi untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana undang-undang ini secara umum sudah mengatur perkara tentang agraria.

Politisi F-PKS ini menambahkan, ada tiga masalah yang menjadi sorotan dalam pembahasan RUU ini, yaitu sengketa tanah yang masih cukup

## MEF Belum Optimal, TNI Diminta Tingkatkan Anggaran

**Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menyampaikan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib meningkatkan anggaran pertahanan untuk menyesuaikan dengan *Minimum Essential Force* (MEF) mereka. Sejauh ini diketahui bahwa anggaran untuk pertahanan kecenderungannya adalah tidak pernah mencapai MEF.**



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha berjabat tangan dengan Panglima TNI

“ Untuk MEF, setiap tahun membutuhkan anggaran sebesar Rp 215 triliun, sementara pagu yang disepakati oleh Kementerian Keuangan itu sebesar Rp 106 triliun, walaupun ada *adjustment* menjadi Rp 107 triliun. Jadi kita masih harus mengorbankan beberapa komponen agar tetap mencapai MEF,” ujarnya, usai rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9).

Politisi Partai Golkar tersebut menyampaikan, bahwa selama ini kisanan MEF pada setiap kesatuan baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun TNI Angkatan Udara itu hanya berkisar 60 persen dan masih jauh dari harapan. Maka dari itu, ia meminta pemerintah untuk meninjau standar daripada MEF tersebut.

banyak, banyak tanah terlantar yang tidak bisa dimanfaatkan karena proses hukum yang panjang, dan permasalahan di bank tanah.

“Makin lama masyarakat makin berkembang. Aktivitas semakin banyak. Kita perlu memastikan ada bank tanah yang nanti bisa digunakan untuk kepentingan publik, bahwa ini memang milik kita bersama, dan bukan cuma milik perorangan yang bernilai ekonomis,” kata Mardani usai pertemuan.

Ia mengusulkan ada solusi dari perwujudan Pengadilan Pertanahan, tetapi pemerintah belum menganggap ini ide yang fundamental. Mereka menginginkan tetap di rezim Peradilan Pidana atau Perdata yang ada, tetapi dengan memberikan beberapa peradilan khusus dalam proses peradilannya.

“Ini masih proses yang perlu kita bahas. Kami berharap undang-undang ini bisa selesai pada periode ini dan memberikan hadiah bagi masyarakat tentang kepastian atas tanah, kemudahan atas tanah, dan pemanfaatan atas tanah itu sendiri,” tutup Politisi dapil Jawa Barat itu. ■ azk/sf

“Kita meminta untuk meninjau kembali standar daripada *minimum essential force* tersebut. Apakah itu ukuran yang realistis atau tidak. Karena selama ini tidak pernah bisa tercapai,” tuturnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah dapat terus meningkatkan atau mengaktifkan kembali kegiatan industri bidang pertahanan dalam negeri. Hal ini menurutnya merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak MEF.

“Kita juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan industri pertahanan dalam negeri, karena hal ini dapat mendongkrak persentase *minimum essential force* itu sendiri,” tegas politisi dapil Jawa Timur itu.

Patut diketahui, MEF atau kekuatan pokok minimum dicanangkan pertama kali tahun 2007 merupakan proses untuk modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Indonesia. MEF dibagi ke dalam tiga rencana strategis hingga tahun 2024. ■ eps/sf

## Komisi V Dukung Pengadaan Kapal Feri di Luwu Timur

**Komisi V DPR RI mendorong dan mendukung Pemerintah dalam pengadaan kapal ferri di Pelabuhan Penyeberangan Danau Matano dan Pelabuhan Penyeberangan Danau Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi V DPR RI menargetkan pada tahun anggaran 2019 mendatang, bisa merealisasikan dua kapal ferri untuk ditempatkan di kedua pelabuhan itu.**



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Penyeberangan Danau Matano dan Danau Towuti di Luwu Timur

“Salah satu yang menjadi kesepakatan kita dengan Ditjen Perhubungan Darat untuk penyiapan angkutan penyebrangan kapal untuk ditempatkan di Pelabuhan Danau Matano dan Danau Towuti. Dua kapal ini Insya Allah di anggaran 2019 itu bisa kita wujudkan, untuk kepentingan wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Luwu ini,” jelas Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Luwu Timur, Sulsel, Jumat (07/9).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, selama ini dua danau tersebut menggunakan kapal penyebrangan tradisional yang disebut oleh masyarakat dengan “Pincara” yang tidak memenuhi standar keamanan, sehingga banyak menelan korban.

Ia berharap dengan adanya dua kapal ferri yang bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2019 bisa

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan keberadaan kapal tersebut akan menghubungkan wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara.

“Karena ini memang satu-satunya angkutan dan berhubungan dengan Sulawesi Tengah. Saya kira sangat signifikan untuk peningkatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, baik untuk wilayah Luwu Timur, Utara, maupun juga Sulawesi Tengah, Tenggara juga,” papar Ibnu.

Politisi dapil Sulawesi Barat itu menjelaskan, kunspek ini untuk mengetahui secara langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Pusat. “Kita sudah rapat kerja dengan Menteri PUPR, salah satunya terkait penyusunan anggaran. Jadi, dasar berpikir dan pijakan penetapan anggarannya adalah hasil kunjungan kerja dan kunjungan spesifik DPR RI,” papar Ibnu. ■ eko/sf

# Komisi VII Komitmen Dorong Pembangunan EBT



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PLTB 72 MW tolo-1, Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

**Komisi VII DPR RI akan terus berkomitmen untuk mendorong pembangunan sektor Energi Baru Terbarukan (EBT), salah satunya adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.**

“Ada dua proyek pembangkit listrik yang kita kunjungi, yakni PLTB dan PLTU Jeneponto. Saya kira keduanya cukup spektakuler, karena progres PLTB sangat maju,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Sulsel, Jumat (07/9).

Sama halnya dengan PLTB, PLTU Jeneponto juga sangat memiliki progres yang baik, lanjut Tamsil. Dikatakannya bahwa PLTU Jeneponto sudah dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pemenuhan kebutuhan listrik di Provinsi Sulsel.

“Saat ini Sulsel sudah mengalami surplus listrik. Keberadaan PLTB dan

PLTU Jeneponto tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi kita karena merupakan sebuah hasil karya anak bangsa,” ujar Tamsil.

Politisi PKS itu berharap, untuk bidang EBT ini tidak akan terkena rencana moratorium sektor energi yang akan dilakukan pemerintah, sebagai dampak dari melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Bahkan, sambung Tamsil, kalau bisa diberikan keringanan-keringanan, khususnya dalam hal pajak bagi barang-barang impor yang menjadi bagian dari kebutuhan yang sangat diperlukan dalam



Foto: Dep/od

proyek pembangunan PLTB Jeneponto.

“Pelemahan rupiah menjadi salah satu faktor kendala yang dihadapi dalam proyek pembangunan pembangkit listrik ini. Hal itu disebabkan adanya kebutuhan barang impor yang akan digunakan dalam pembangunan proyek PLTB Jeneponto tersebut,” jelasnya.

Politisi dapil Sulsel itu menyampaikan, jika dilihat dari progres pembangunan yang telah dilakukan, Komisi VII DPR RI optimis bahwa PLTB Jeneponto dapat segera beroperasi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi. ■ dep/sf



Foto: Arief/od

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau TPS Limbah B3 PT. Haikki Green di Batam, Kepri

## Komisi VII Minta KLHK Galakkan Sosialisasi Perizinan Pengelolaan Limbah B3

**Potensi limbah industri yang berada di Batam, Provinsi Kepulauan Riau cukup besar. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menggalakkan sosialisasi Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).**

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Firmandez usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Bahaya dan Beracun (Ditjen PSLB3) KLHK serta jajaran manajemen PT. Desa Aircargo dan PT. Haiki Green, di Kantor Pengelolaan Limbah Desa Aircargo, Batam, Kepri, Jumat (07/9).

“Harus ada sosialisasi dari KLHK tentang perubahan sistem perizinan pengelolaan limbah, agar bisa lebih baik dengan teknologi yang lebih baik, serta kesadaran dari pemilik perusahaan ini perlu ditingkatkan agar bisa disinergikan” dorong Firmandez.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini melihat, Ditjen PSLB3 KLHK menyampaikan sistemnya terus diperbaharui, namun pembaharuan ini tidak diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang mengerjakan, sehingga mereka mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Pengawasannya perlu disempurnakan dan ditingkatkan.

“Persoalan perizinan sampai 2 tahun, artinya ini ada yang tidak benar. Kalau menurut Dirjen PSLB3, beliau menyatakan bahwa pihak perusahaan pengolahan limbah tidak mau melengkapi. Ini kan permainan dari pemilik perusahaan. Nanti akan kita sisir kembali,” tegas Politisi dapil Aceh itu.

Di tempat yang sama Dirjen PSLB3 KLHK Vivien Ratnawati menambahkan, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *One Single Submission* terkait dengan semua perizinan yang ada di Indonesia berada dalam satu pintu, juga termasuk dalam izin yang terkait pengelolaan limbah B3.

“Kami tidak mau menghambat, prinsipnya perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah mengurus izinnya adalah perusahaan yang sebentar lagi ditandatangani. Tapi sekarang mereka harus melalui proses dari OSS datang ke KLHK, untuk kita bersama-sama mengurus proses perizinannya dengan cepat,” katanya. ■ afr/sf

# Komisi V Tinjau Pembangunan Bandara Tjilik Riwut

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto meninjau terminal baru Bandara Kelas I Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (06/9). Anton menjelaskan, kunspek kali ini guna melihat progress pembangunan infrastruktur terminal baru yang sudah dibangun sejak tahun 2014 lalu.



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau terminal baru di Bandara Kelas I Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalteng

Foto: Rumi/od

“Hingga pada tahun 2018 ini, pembangunannya sudah mencapai 92 persen. Menurut saya, kondisi pembangunan sudah tidak ada kendala, sudah baik dan tidak ada masalah. Sekarang kita doakan saja, sebelum bulan April tahun depan bisa segera diresmikan,” kata Anton di sela-sela peninjauan terminal baru Bandara Tjilik Riwut.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, mengenai anggaran sudah tidak ada masalah. Anggaran yang mencapai Rp 361 miliar, sudah terserap dengan nilai Rp 308 miliar hingga saat ini. Dan nantinya pembangunan bandara jika sudah terselesaikan, akan diserahkan dari Kementerian Perhubungan kepada pihak Angkasa Pura sebagai pengelola bandara.

“Dan saya berharap jika sudah diresmikan nantinya, bisa dikelola dengan baik, dan juga bisa digunakan oleh masyarakat agar bisa lebih nyaman dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan alat transportasi udara,” harap politisi dapil Jawa Barat V itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Intan Fitriana Fauzi usai meninjau Bandara Tjilik Riwut. Politisi PAN itu menilai progress pembangunan terminal baru Bandara Tjilik Riwut ini dalam kesiapannya sudah baik, dan siap untuk digunakan.

“Tentunya saya melihat progress tersebut sebagaimana yang diharapkan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran yang menginginkan bandara bisa ditingkatkan sebagai bandara internasional, Insya Allah bisa terwujud dan terlaksana dengan baik,” harap Intan.

Lebih lanjut Intan berharap, dengan adanya bandara baru ini, konsentrasi pemerintah di bidang infrastruktur bisa meningkatkan konektivitas di berbagai provinsi, atau antar pulau.

“Sehingga Kalteng dengan berbagai sumber daya alamnya, perekonomian di wilayah ini bisa meningkat, dan juga infrastruktur yang menghubungkan antara satu provinsi dan provinsi lainnya,” harap politisi dapil Jabar itu.

Sementara itu, menurut Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti (F-Gerindra), Bandara Tjilik Riwut ini akan menjadi bandara yang besar dengan kapasitas kurang lebih 3000 penumpang, dengan jumlah penerbangan tiap jamnya atau tiap harinya bisa mencapai 40 penerbangan.

“Kita melihat sangat senang sekali, karena ini adalah satu daerah masa depan dengan penduduk 2,5 juta orang dan menjadi satu daerah yang diproyeksikan ke depan menjadi daerah pilihan yang terbaik,” kata Politisi dapil Jawa Tengah itu.

Adapun beberapa fasilitas yang masih dalam progress pekerjaan lanjutan yakni pembuatan apron baru, pembuatan taxi way, termasuk marking dan pekerjaan lanjutan pembuatan *Ground Support Equipment (GSE) Road* sebagai penghubung terminal baru dan apron baru. Dan nantinya desain interior digunakan merupakan desain khas yang merupakan kearifan lokal Kalteng.

■ rni/sf



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau lokasi pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo di Aceh

Foto: Andri/od

## Komisi V Perjuangkan Pembangunan Pelabuhan Sibigo

**Anggota Komisi V DPR RI Irmawan memastikan, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo di Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh pada tahun 2019 mendatang. Untuk tahun ini, akan dilakukan proses pematangan seluruh proses perencanaan terkait kesiapan lahan dan lain-lain yang dianggap perlu.**

“Jika seluruh perencanaan sudah matang maka tahun depan tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan. Rencananya pelabuhan penyeberangan ini akan dijadikan pasangan Pelabuhan Kuala Bubon di Aceh Barat,” kata Irmawan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau langsung lokasi pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo, di Simeulue Barat, Simeulue, Aceh, Jumat (07/9).

Lebih lanjut politisi PKB itu memaparkan, pelabuhan laut merupakan

sarana penghubung antar moda lautan dan daratan. Pelabuhan merupakan sarana transportasi laut yang sangat efektif untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain yang berada pada kawasan kepulauan seperti di Indonesia.

Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat, maka diperlukan pembangunan prasarana transportasi laut yang memadai, yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan memudahkan angkutan barang atau orang bagi kawasan tersebut. Sibigo

saat ini merupakan Ibu Kota Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue.

“Kami berharap pelabuhan penyeberangan Sibigo ini segera dibangun, karena sangat diharapkan oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat sekitar Kecamatan Simeulue Barat, namun warga masyarakat Kecamatan Alafan, Teluk Dalam hingga Kecamatan Simeulue Tengah,” harap politisi dapil Aceh itu.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Bupati Simeulue Afridawati. Ia berharap pembangunan pelabuhan ini sangat membantu meningkatkan roda ekonomi warganya dan masyarakat Kabupaten Simeulue umumnya. Mengingat akses yang ditempuh tidak lagi serumit tahun-tahun sebelumnya.

“Sekarang jalan menuju Simeulue Barat akan terasa sangat dekat, mengingat jalan tempuh dari kecamatan Alafan, Simeulue Tengah dan Salang sudah relatif singkat. Karena itu pembangunan Pelabuhan ini sangat diharapkan oleh masyarakat kecamatan tersebut. Terlebih jarak penyeberangan antara Simeulue Barat dengan Kuala Bubon Aceh Barat hanya ditempuh dengan waktu 6 jam,” jelas Afridawati. ■ man/sf



Foto: Rizka/od

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PLTP Tulehu

## PLTP Tulehu Bisa Penuhi Kebutuhan Energi

Studi kelayakan (*feasibility study*) atas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu, di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sudah rampung, setelah beberapa waktu lalu dilakukan *ground breaking*. Diharapkan, PLTP Tulehu bisa sukses memenuhi kebutuhan energi masa depan.

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam mengungkapkan hal itu saat memimpin Tim

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Maluku Tengah, Maluku, untuk melihat dari dekat progres PLTP Tulehu, Jumat (07/9).

Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi listrik baru dan terbarukan, khususnya untuk memenuhi target pembaruan energi sebesar 23 persen. Pembiayaan di awal eksplorasi ini memang cukup besar dan punya risiko tersendiri bila tidak berhasil.

“Kita ingin melihat progres, setelah PLTP ini di-*ground breaking* beberapa waktu lalu. Kini sudah tahap *feasibility study* untuk sumber sumur eksplorasi. Kita berharap, ini menjadi salah satu PLTP yang sukses dikerjakan oleh PLN,” tutur Syaikhul.

PLTP Tulehu, kata Syaikhul, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi listrik baru dan terbarukan, khususnya untuk memenuhi target pembaruan energi sebesar 23 persen. Pembiayaan di awal eksplorasi ini memang cukup besar dan punya risiko tersendiri bila tidak berhasil.

Menurut Anggota F-PKS DPR RI itu, hal ini adalah tantangan dari eksplorasi PLTP. Namun, bila berhasil dan sudah berjalan dengan baik, biayanya pasti turun, karena tak perlu membeli energi lagi untuk kebutuhan operasional sehari-hari.

“Ada beberapa mitigasi risiko yang dilakukan PLN untuk model panas bumi, karena memang selalu ada risiko untuk gagal dalam eksplorasi. Secara statistik di Indonesia ini keberhasilannya 50 persen. Tapi untuk lokasi di sini, kalau dikaji lebih serius bisa diminimalisir menjadi 70 atau 80 persen. Jadi kita berharap target 20 Mega Watt itu tercapai 23 persen,” papar Syaikhul.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Riyanto (F-Gerindra) mempertanyakan penggunaan tenaga lokal di lokasi eksplorasi panas bumi ini.

Menanggapi hal itu, Direktur PLN untuk Gas dan Geothermal Yudistian Yunos mengatakan, lebih dari 50 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sini, terutama masyarakat lokal dari Desa Suli dan Desa Tulehu.

Otoritas PLN sendiri menjelaskan, PLTP Tulehu berkapasitas 2x10 MW terletak di Desa Suli dan Tulehu, Maluku Tengah, Maluku. PLTP ini menjadi PLTP pertama yang dibangun oleh PLN.

PLTP Tulehu ditargetkan beroperasi secara komersial atau *Commercial Operation Date* (COD) pada tahun 2019. PLTP yang dibangun di atas lahan 1.920 Ha tersebut akan memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Ambon yang hingga saat ini dihasilkan dari PLTD dengan daya mampu 61,9 MW dan beban puncak 54 MW. ■ **ran/sf**

## Legislator Minta BUMN Perhitungkan Dampak Pelemahan Rupiah

Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hendaknya mulai menghitung asumsi dampak atau kerugian yang dialami perusahaan BUMN, terkait dengan melemahnya mata uang rupiah, termasuk seberapa jauh perusahaan tersebut dapat bertahan menghadapi penguatan dolar Amerika Serikat (AS).



Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie

Foto: Rumi/od

terhadap rupiah yang kini mencapai Rp 15.100 per dolar AS. Kementerian BUMN harus bergerak cepat dalam menyelamatkan aset negara.

“Saya khawatir dengan perusahaan-perusahaan BUMN, terkait semakin menguatnya mata uang dolar AS terhadap rupiah. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan BUMN kedepannya, apabila dolar mencapai hingga Rp16.000? Atau sampai titik berapa BUMN-BUMN ini dapat bertahan dengan baik?”

Kementerian BUMN harus bergerak cepat,” imbuhnya.

Lebih lanjut politisi dapil Lampung itu berpendapat, setiap perusahaan yang ada di bawah naungan Kementerian BUMN harus mempunyai strategi dalam meningkatkan kinerja, agar dapat mencapai target pendapatan dan persentase kesanggupan pemberian dividen.

“Perusahaan BUMN-BUMN harus mempunyai strategi yang bagus dalam meningkatkan kinerja, agar target pendapatan yang sudah ditentukan dapat tercapai. Dan persentase kesanggupan pemberian dividen juga harus disampaikan ke Komisi VI DPR RI,” pesan Aroem. ■ **tn/sf**

“Terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia terkini, perlu juga Kementerian BUMN atau perusahaan BUMN mulai menghitung dan mempertimbangkan asumsi apabila nilai tukar rupiah melemah, terutama yang memiliki beban subsidi atau *public service obligation* (PSO),” papar Aroem, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (06/9).

Politisi Partai Golkar ini mengkhawatirkan keberlangsungan perusahaan-perusahaan BUMN di masa depan, dengan semakin menguatnya mata uang dolar AS

# Komisi X Dorong Peningkatan Akreditasi Poltekpar Medan



Foto: Ayu/od

Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Sutan Adil Hendra mengunjungi Poltekpar Negeri Medan, Sumut

**Komisi X DPR RI mengapresiasi Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Medan, Sumatera Utara yang terus berbenah. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan status dari akademik ke politeknik. Namun, masih ada permasalahan yang mendapat sorotan Komisi X DPR RI, dimana Poltekpar Medan hanya mendapat akreditasi C. Untuk itu, Komisi X DPR RI mendorong peningkatan akreditasi Poltekpar Medan.**

“Kami mengapresiasi Poltekpar Medan ini yang terus berbenah. Namun seiring dengan perjalanannya, kami sempat mendapat laporan ada berbagai kendala, salah satunya terkait dengan akreditasi Poltekpar Medan ini yang masih mendapat akreditasi C,” jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Poltekpar Medan, Sumut, Jumat (07/9).

Dengan akreditasi C, Poltekpar Medan terancam di-merger-kan, alias disatukan dengan perguruan tinggi lain, bahkan bukan tidak mungkin akan ditutup. Politisi Partai Gerindra itu menilai, kondisi tersebut cukup memprihatinkan. Pasalnya, di Indonesia

hanya ada enam perguruan tinggi negeri Pariwisata, dan salah satunya ada di Medan. Tentu sangat disayangkan jika Poltekpar Medan itu di-merger atau bahkan ditutup.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan Poltekpar Medan itu mendapat akreditasi C. Diantaranya sejarah Poltekpar tersebut yang sebelumnya di bawah binaan Kementerian Pariwisata, beralih ke Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

“Mungkin selama ini Kementerian Pariwisata tidak memahami bagaimana persyaratan-persyaratan agar Poltekpar ini bisa memenuhi berbagai persyaratan akreditasi, seperti dosen atau pengajar

yang harus sesuai kompetensi,” papar politisi PDI Perjuangan itu.

Tidak hanya itu, lanjut Sofyan, dari rasio Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa juga menjadi salah satu indikator akreditasi sebuah perguruan tinggi, termasuk Poltekpar Medan, Sumatera Utara. Namun, Direktur Poltekpar Medan Anwari Masatib menargetkan pada tahun 2019 mendatang mahasiswanya akan mampu mencapai IPK 3,50.

Oleh karena itu, baik Sutan

maupun Sofyan, serta beberapa Anggota Tim Kunspek Komisi X DPR RI lainnya seperti Marlinda Irwanti (F-PG), Arzetty Bilbina (F-PKB), Anita Jacoba Gah (F-PD), Nuroji (F-Gerindra), Dadang Rosdiana (F-Hanura), Zuhdi Yahya (F-PDI Perjuangan), Laila Istiana (F-PAN), Mustafa Kamal (F-PPS), Anas Tahir (F-PPP), dan Yayuk Basuki (F-PAN) sepakat mendorong Poltekpar Medan untuk meningkatkan akreditasi kampusnya.

“Kami akan memberikan dorongan, dari anggaran, legislasi dan pengawasan, bahkan bisa melalui panja untuk mempercepat peningkatan akreditasi Poltekpar ini agar dapat menciptakan SDM-SDM yang handal dan profesional di bidang pariwisata nasional, bahkan internasional. Bahkan dengan berbagai target perbaikan yang ditetapkan oleh Direktur Poltekpar tersebut, tentu tidak ada alasan lagi bagi Kemristekdikti untuk tidak meningkatkan akreditasi kampus tersebut, minimal menjadi B,” tegas Sutan yang diamini seluruh Anggota Tim. ■ ayu/sf



# Legislator Apresiasi Pemerintah Tangani Gempa Lombok

**Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang cepat dan sigap dalam membantu para korban bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok, sehingga para korban merasa diperhatikan dengan baik.**



Foto: Andri/od

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena

yang menggunakan penutup dari daun kelapa yang tidak layak. Kalau hujan akan menjadi masalah besar. Satu-satunya cara adalah melakukan relokasi sementara para pengungsi, agar mendapatkan tempat yang pantas,” harapnya. **tn/sf**

**H**al ini disampaikan pada saat rapat koordinasi DPR RI dengan pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah, dalam menanggapi kejadian gempa yang terjadi di NTB, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/9).

“Saya mengapresiasi tindakan pemerintah, khususnya BNPB yang sudah melaksanakan tanggap cepat. Karena memang pada hari kejadian semuanya panik serta lebih dari 60 persen sistem

pemerintahan lumpuh. Jadi pemerintah di sana mengantor di tenda, sehingga banyak terjadi kekurangan yang menghambat kinerja pemerintahan,” kata Ermalena.

Politisi PPP itu berpendapat, perlunya hunian tempat tinggal sementara kepada para korban gempa bumi Lombok, karena tenda yang ditinggali sudah mengalami berbagai macam masalah dan dampak cuaca yang sering mengalami perubahan.

“Hunian sementara merupakan sebuah keharusan, karena hujan akan datang dan tenda sebagian sudah bocor dan tidak bisa digunakan, serta fasilitas ibadah

## Tahap Rehab Rekon Gempa Lombok Bisa Dilakukan Optimal

**Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly mengatakan, pihaknya sudah menggelar dua kali rapat membahas gempa Lombok, yaitu dengan Kementerian Sosial dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, pemerintah sudah bekerja cukup baik dan langkah awal adalah mencukupi kebutuhan pengungsi, kebutuhan dasar mereka harus benar-benar tercukupi.**

**S**eusai mengikuti Rapat Konsultasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri Kabinet Kerja terkait membahas penanganan gempa Lombok yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/9), Ace mengatakan, setelah masa tanggap darurat selesai, kini masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) bisa dilakukan optimal.

Pada tahap itu, Komisi VIII DPR RI mengharapkan agar Kemensos segera menangani korban gempa dengan rehabilitasi sosial, termasuk *trauma healing* (menghilangkan trauma) akibat bencana, untuk bisa membangkitkan kembali rasa percaya diri sehingga kembali normal.



Foto: Andri/od

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly

Kata politisi Partai Golkar ini, khususnya para pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda, ketika ada gempa susulan selalu dalam posisi ketakutan. “Karena itu, Komisi VIII DPR RI mendorong Kemensos mengirim Tim Pemulihan terhadap dampak psikologis atau

psikososial akibat bencana gempa bumi tersebut,” jelas politisi dapil Banten itu.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam penjelasannya kepada Komisi VIII DPR RI baru-baru ini menyebutkan, dalam penanganan bencana gempa NTB, pihaknya telah melakukan program rehabilitasi sosial dengan menyebar 85 petugas di 15 pos Layanan Dukungan Psikososial (LDP) ke titik-titik pengungsian.

Adapun bentuk kegiatannya berupa terapi psikologis mencakup kataris mental, *trauma healing*, konseling, intervensi krisis dan motivasi hidup. Selain itu terapi bermain seperti sulap, *games* dan *flying fox*, terapi pendidikan, terapi spiritual, terapi seni, terapi hipnotis dan terapi olahraga.

Rehabilitasi sosial lainnya adalah kampanye sosial NTB Bangkit dan Bangun Kembali, Pondok Anak Ceria di 59 lokasi mencakup 5.811 anak dan Gerakan Back To School sebanyak 700 anak di SMPN 6 dan SMPN 7 Mataram. Kemensos juga memberi bantuan khusus kepada 512 disabilitas, 978 lanjut usia dan 22.070 anak panti. **mp/sf**

# Komisi X Tinjau Perkembangan Pendidikan Poltekpar Makassar



Tim Kunspek Komisi X DPR RI mengunjungi Poltekpar Negeri Makassar, Provinsi Sulsel

**Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati meninjau Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (07/9). Dalam kunjungan itu, Komisi X DPR RI ingin mengetahui secara langsung perkembangan pendidikan pariwisata di Poltekpar Makassar.**

“Kami ingin mendapatkan data empiris sebagai rujukan dalam pengambilan dan penentuan kebijakan, khususnya dalam bidang pendidikan pariwisata serta melaksanakan sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata pada tahun 2019,” kata Reni dihadapan Direktur Poltekpar Makassar Muhadjir Suni bersama civitas akademika Poltekpar Makassar.

Sasaran umum pembangunan itu, lanjut politisi PPP itu, antara lain terlaksananya pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata, terlaksananya fasilitas, dukungan perbaikan, dan peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata, terlaksananya peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat serta terlaksananya komunikasi pemasaran pariwisata dalam negeri ke mancanegara.

Di samping itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang mengambil tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, Reni menjelaskan pemerintah akan lebih fokus pada pembangunan manusia Indonesia.

“Dengan mengacu pada tema RKP tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2019 utamanya akan berfokus pada

Foto: Eka/od

## Calon Debitur KUR Perlu Didampingi

Lahirnya gagasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan perwujudan bantuan pemerintah kepada sektor perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memang perlu dibantu. Di dalam penyaluran KUR, walaupun jumlahnya kecil tetap harus ada pendampingan, untuk memastikan usaha para debitur benar-benar berjalan dengan baik.

Anggota Komisi XI DPR RI Harry Poernomo saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara mengatakan, pentingnya pendampingan, edukasi serta pemahaman kepada masyarakat calon debitur KUR, bahwasanya KUR itu adalah bantuan untuk meringankan usaha masyarakat.

“Usaha pendampingan ini saya kira belum berjalan dengan maksimal. Mungkin karena sumber daya perbankan untuk pendampingan KUR belum memadai. Karena sejatinya bank bukan semata-mata untuk menyalurkan KUR,” kata Harry

setelah pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penyedia jasa perbankan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (07/9).

Harry menambahkan masyarakat sebagai calon debitur, atau masyarakat yang ingin memanfaatkan KUR ini harus benar-benar paham. Agar dalam penggunaannya, debitur betul-betul bertanggung jawab. Hal inilah yang saat ini belum tercapai, yang menyebabkan banyak kredit macet terkait KUR ini.

“KUR macet di Sulawesi Utara dalam 3 tahun terakhir bahkan mencapai angka



Anggota Komisi XI DPR RI Harry Poernomo

Foto: Erman/od

91 persen, walaupun secara nominal tidak besar, hanya Rp3 miliar, tetapi persentasenya besar. Memang ini agak dilematis dan butuh proses. Yang penting masyarakat

upaya sumber daya manusia dan upaya pemerataan pembangunan wilayah,” imbuh politisi dapil Jawa Barat V itu.

Direktur Poltekpar Makassar Muhadjir Suni dalam pemaparannya memperkenalkan Poltekpar mulai dari sejarah berdirinya hingga fasilitas kampus. Ia meminta dukungan Anggota Komisi X DPR RI dalam mewujudkan berdirinya gedung perkuliahan hingga berlantai 9, dan hotel yang dibangun mengusung konsep bintang lima.

“Gedung kuliah baru yang rencananya 3 lantai, akan dibangun hingga 9 lantai serta hotel dengan corak phinisi.

Harapannya Komisi X DPR RI memberi dukungan sebagai pihak yang mengatur anggaran pariwisata,” papar Muhadjir dihadapan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dan stakeholder terkait.

Kunspek ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dan sejumlah Anggota Komisi X DPR RI yakni Wiryanti Sukamdani (F-PDI Perjuangan), Jimmy Demianus Ije (F-PDI Perjuangan), Hasnuryadi Sulaiman (F-PG), Nizar Zahro (F-Gerindra), Iwan Kurniawan (F-Gerindra), Putu Supadma Rudana (F-PD), Amran (F-PAN), Toriq Hidayat (F-PKS), Anwar Idris (F-PPP) dan Titik Prasetyowati Verdi (F-NasDem).

■ hr/sf

terus diedukasi dan didampingi,” papar politisi Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.

Ia menekankan, jika Pemerintah benar-benar ingin mewujudkan KUR ini menjadi lebih baik, Pemerintah bisa menciptakan bank yang bergerak khusus di bidang KUR. “Kita bisa mencontoh keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pasar. Keduanya adalah bank swasta yang khusus bergerak di bidang KUR,” saran Harry.

Bila dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), menurut Harry, aktivitas KUR perlu dioptimalkan. Karena daya tahan perekonomian masyarakat ada di sektor UMKM. Dengan kondisi rupiah terus melemah yang terkena imbas langsung adalah industri-industri besar.

“Kalau sektor sektor UMKM itu daya tahannya terhadap krisis itu tangguh dan sudah terbukti saat terjadi krisis moneter 1998. Walaupun kelak terdampak, dampaknya pun diyakini akan kecil,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah itu. ■ es/sf

## Peninggalan Budaya Dapat Tingkatkan Ekonomi Masyarakat



Tim Kunspek Komisi X DPR RI di Palembang, Sumsel

Foto: Angga/od

**Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto menilai Indonesia wajib memperhatikan dan melestarikan tempat-tempat peninggalan leluhur menjadi salah satu destinasi wisata. Dengan adanya peninggalan budaya serta berbagai upaya pelestariannya, menurutnya akan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.**

**D**itemui Parlementaria saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kampung Kapitan, yang merupakan salah satu destinasi pariwisata dan sentra pembuatan makanan khas di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, ia melihat banyak hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

“Kami mengunjungi daerah peninggalan leluhur dan ternyata di sana menarik. Masyarakat bisa menjadikan pabrik pempek sebagai destinasi wisata. Klenteng di daerah itu bisa direvitalisasi juga agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya se usai tinjauan bersama Tim Kunspek Komisi X DPR RI di Palembang, Sumsel, Jumat (07/9).

Politisi Partai Demokrat ini berjanji akan membahas masalah peningkatan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan peninggalan budaya lebih lanjut dalam rapat, dan memanggil Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar daerah peninggalan leluhur tersebut dapat dibiayai untuk dilestarikan.

“Nanti kita akan bahas lebih lanjut hal ini. Tentunya dalam rapat dengan Pemerintah, dalam hal ini yang berwenang Ditjen Kebudayaan, agar daerah peninggalan leluhur tersebut dapat dilestarikan. Tentunya ada biaya yang akan dibahas karena tempat itu butuh direvitalisasi,” tutur Politisi dapil Jawa Tengah III tersebut.

Kunspek ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (F-PKS), dan sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, Asdy Narang (F-PDI Perjuangan), MY Esti Wijayati (F-PDI Perjuangan), Noor Achmad (F-PG), Bambang Sutrisno (F-PG), dan Ferdiansyah (F-PG).

Kemudian Popong Otje Djundjungan (F-PG), Mujib Rohmat (F-PG), Sri Meliyana (F-Gerindra), Dewi Coryati (F-PAN), Zainul Arifin Noor (F-PKB), Dedi Wahidi (F-PKB), Lathifah Shohib (F-PKB), Ledia H. Amaliah (F-PKS), Ratih Sanggarwaty (F-PPP), dan Zairina (F-Hanura). ■ eps/sf

# Baleg Sepakati RUU Migas Menjadi Usul Inisiatif DPR



Foto: Rumi/oc

Suasana penandatanganan persetujuan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) menjadi usul inisiatif DPR RI di Baleg

**Sepuluh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) menjadi usul inisiatif DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI. Keputusan ini diambil setelah sepuluh fraksi menyampaikan pandangan dan menyerahkan draf tentang persetujuan dan catatan tentang RUU Migas.**

Dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/9) seluruh fraksi telah menyatakan sikap. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menanyakan kembali kepada seluruh perwakilan fraksi dan pengusul RUU dari Komisi VII DPR.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI?” tanya Supratman, para peserta rapat menyambut dengan jawaban “Setuju”, dan ketuk palu pimpinan sidang menjadi

pertanda pengesahan keputusan rapat.

Pengusul RUU Migas dari Komisi VII DPR RI diwakili oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyampaikan, pada prinsipnya pihaknya telah menerima hasil harmonisasi yang telah disampaikan oleh Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Baleg.

“Kami dari Komisi VII DPR RI pada prinsipnya menerima hasil harmonisasi yang telah disampaikan oleh Ketua Tim Panja Baleg, dan juga sudah mendapat persetujuan dari sepuluh paksi Baleg DPR RI. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kami lanjutkan di Komisi VII untuk dilaksanakan pembahasan RUU Migas yang telah diharmonisasi,” papar Ridwan.

Setelah semua perwakilan dari sepuluh fraksi menandatangani kesepakatan rapat, Supratman menjelaskan poin krusial yang disepakati dalam RUU ini. Pertama berkaitan dengan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) untuk migas, dia membeberkan sesuai dengan kesepakatan BUK yang dimaksud nantinya tetap ada dibawah koordinasi Kementerian BUMN.

“Tadinya teman-teman di Komisi VII itu menginginkan Badan Usaha Khusus itu di bawah koordinasi Presiden. Tetapi yang kita sepakati di tingkat panja, itu tetap ada di bawah Kementerian BUMN, supaya menyangkut BUMN itu tetap jalan,” ungkap Supratman.

Yang kedua soal kuota impor minyak, Supratman mengatakan, “Itu kita lakukan ada kontrol lewat badan BPH Migas, supaya kuotanya bisa dikontrol menyangkut pengadaan BBM kita. Nah itu kira-kira yang penting,” ujar politisi Partai Gerindra itu. ■ eko/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua dan Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf pada WPFSD Ke - 2

Foto: Ekai/od

ke-2, di Bali, Rabu (12/9). Ia mengingatkan bahwa WPFSD merupakan forum parlemen pertama dan satu-satunya di dunia yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan SDGs.

Politisi Partai Demokrat yang aktif di pelbagai forum internasional itu juga melaporkan bahwa WPFSD ke-2 ini dihadiri 194 peserta yang berasal dari parlemen 45 negara, 5 negara observer, dan perwakilan lembaga internasional yaitu ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Ernst and Young, Geneva Council for International Affairs and Development (GCIAD), United Nations Environment Programme (UNEP), the

Westminster Foundation for Democracy (WFD), Women Political Leaders Global Forum, Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM), dan the Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pada sambutannya menekankan pentingnya mengubah perspektif manusia dari konsumsi energi menjadi efisiensi energi yang dibarengi diversifikasi energi. Lebih jauh, politisi Partai Golkar itu menekankan kepada peserta forum untuk bersama mewujudkan ketahanan energi dan pembangunan yang mengedepankan teknologi energi bersih melalui kerja sama global dan aksi kolektif dari seluruh anggota parlemen dunia yang menghadiri forum ini.

Pada WPFSD ke-2 tercatat sejumlah negara menyampaikan posisi nasional mereka terhadap isu energi pada sesi *National Statement*, yaitu Kiribati, Kepulauan Solomon, Tonga, Armenia, Botswana, Mesir, Ghana, Indonesia, dan Madagaskar. Mereka menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan WPFSD ke-2 dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan komitmen mereka terhadap energi terbarukan. ■

eko/sf

# BKSAP Jalin Kerja Sama Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

**Sukses mengelat Forum Parlemen Internasional Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) untuk pertama kalinya tahun lalu, DPR RI kembali melanjutkan kiprah internasionalnya dengan menyelenggarakan WPFSD ke-2 di Bali, 12-13 September 2018.**

**S**ukses mengelat Forum Parlemen Internasional Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) untuk pertama kalinya tahun lalu, DPR RI kembali melanjutkan kiprah internasionalnya dengan menyelenggarakan WPFSD ke-2 di Bali, 12-13 September 2018.

Forum bertema “Kemitraan Menuju Energi Berkelanjutan bagi Semua” itu dibuka langsung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Lebih jauh, dalam Laporan Penyelenggara

WPFSD ke-2 oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf disampaikan bahwa forum ini kembali menekankan pentingnya kerja sama global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

“Kita berharap WPFSD ke-2 ini akan terus berlangsung secara rutin dalam upaya meningkatkan peran parlemen dalam pengarusutamaan SDGs dalam kebijakan nasional masing-masing negara peserta,” ujar Nurhayati dalam laporannya di hadapan peserta WPFSD



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Yaman untuk Indonesia Abdulgani Nassr Ali Al Shamiri di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (07/9/2018). Foto: Kresno | OD.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Bogor (kiri) dan 350 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kabupaten Bogor (kanan) di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin (10/9/2018). Foto: Geraldi-Andri | OD



Tim Monitoring Bagian Penerbitan Setjen DPR RI meninjau distribusi Majalah dan Buletin Parlemen di Terminal Penumpang Nusantara Pura II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (12/9/2018). Foto: Dok.Penerbitan | OD